



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 91372

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 775.000.000

1. Tanah Seluas 236 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 1150 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1175 m2/63 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.000.000

1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO E1FO2N12M2 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT X1B02N0410 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
5. MOTOR, HONDA BEAT DIB02N26L2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.850.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 78.244.230**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.019.094.230



III. HUTANG

Rp. 23.175.739

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 995.918.491

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.